FUNDAMENTAL RESOURCE DALAM REKAYASA SOSIO-HISTORIS DALAM HISTORIOGRAFI PERISTIWA HISTORIS

Pemicu Oleh Sistem Nilai Aksiologis di Banyak Model Peradaban Dunia yang Bersumber dari Perspektif Berbeda dalam Persoalan Etika dan Estetika

Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P.

Peneliti Independen

Bandar Lampung, Indonesia

2026

ABSTRAK

Tulisan ini mengajukan tesis bahwa sistem nilai aksiologis — etika dan estetika — berfungsi sebagai fundamental resource yang memicu rekayasa sosio-historis dalam historiografi peristiwa, melalui relasi yang bersifat dialektis-resiprokal, bukan kausal satu arah. Aksiologi suatu peradaban membentuk kriteria tentang apa yang dianggap layak-historis dan layak-estetis untuk dinarasikan, sementara historiografi yang telah terbentuk melalui kriteria itu kemudian balik memperkuat dan mereproduksi sistem aksiologis yang melahirkannya. Tesis ini diuji melalui penelusuran komparatif atas empat peradaban besar dunia: Barat (etika rasional-individual dan estetika mimesis-progresif, menghasilkan historiografi heroik-linear), Cina (etika relasional-harmoni dan estetika keseimbangan kosmik, menghasilkan historiografi siklikal Mandat Langit), India (etika dharma-karma dan estetika rasa-transendensi, menghasilkan historiografi kosmologis-siklikal itihasa), dan Islam (etika tauhid-maqashid al-syari'ah dan estetika keseimbangan transenden, menghasilkan historiografi providensial-umat). Tulisan ini menyimpulkan bahwa pola dialektis aksiologi-historiografi bersifat universal sebagai mekanisme, namun isi dan arah konkret rekayasa yang dihasilkannya senantiasa partikular, ditentukan oleh perspektif etis-estetis yang menjadi akar masing-masing peradaban.

Kata Kunci: aksiologi, etika dan estetika, rekayasa sosio-historis, historiografi komparatif, dialektika nilai, peradaban dunia

DAFTAR ISI

ABSTRAK **2**
DAFTAR ISI **3**
BAB I — PENDAHULUAN **4**
BAB II — KERANGKA TEORETIS: AKSIOLOGI SEBAGAI FUNDAMENTAL RESOURCE DALAM DIALEKTIKA HISTORIOGRAFIS **5**
2.1 Aksiologi: Etika dan Estetika sebagai Dua Cabang Satu Akar 5
2.2 Dari Sign-Signifier ke Fundamental Resource: Pembalikan Arah Analisis 5
2.3 Dialektika: Historiografi sebagai Reproduksi dan Revisi Aksiologi 5
2.4 Kerangka Komparatif: Empat Peradaban, Empat Akar Aksiologis 6
BAB III — PERADABAN BARAT: RASIONALITAS INDIVIDUAL, PROGRES LINEAR, DAN HISTORIOGRAFI HEROIK **7**
3.1 Akar Aksiologis: Etika Rasional-Individual dan Estetika Mimesis-Progresif 7
3.2 Bagaimana Aksiologi Memicu Historiografi: Narasi Heroik dan Teleologi Sejarah 7
3.3 Dialektika Balik: Historiografi Heroik Memperkuat Individualisme 7
3.4 Rekayasa: Siapa yang Menentukan "Layak Historis" di Barat? 7
BAB IV — PERADABAN CINA: HARMONI RELASIONAL, KESEIMBANGAN KOSMIK, DAN HISTORIOGRAFI MANDAT LANGIT **9**
4.1 Akar Aksiologis: Etika Relasional-Harmoni dan Estetika Keseimbangan 9
4.2 Bagaimana Aksiologi Memicu Historiografi: Mandat Langit dan Siklus Dinasti 9
4.3 Dialektika Balik: Historiografi Siklikal Memperkuat Etika Harmoni 9
4.4 Rekayasa: Estetika Keseimbangan sebagai Instrumen Legitimasi 10
BAB V — PERADABAN INDIA: DHARMA-KARMA, TRANSENDENSI RASA, DAN HISTORIOGRAFI KOSMOLOGIS-SIKLIKAL **11**
5.1 Akar Aksiologis: Etika Dharma-Karma dan Estetika Rasa-Transendensi 11
5.2 Bagaimana Aksiologi Memicu Historiografi: Waktu Siklikal dan Itihasa sebagai Mitos-Sejarah 11
5.3 Dialektika Balik: Itihasa Memperkuat Dharma sebagai Kerangka Hidup 11
5.4 Rekayasa: Kasta, Legitimasi Dinasti, dan Reinterpretasi Dharma 12
BAB VI — PERADABAN ISLAM: TAUHID, MAQASHID AL-SYARI'AH, DAN HISTORIOGRAFI PROVIDENSIAL-UMAT **13**
6.1 Akar Aksiologis: Etika Tauhid-Maqashid dan Estetika Keseimbangan Transenden 13
6.2 Bagaimana Aksiologi Memicu Historiografi: Sejarah sebagai Providensi Umat 13
6.3 Dialektika Balik: Historiografi Providensial Memperkuat Maqashid sebagai Kerangka Politik 13
6.4 Rekayasa: Tauhid sebagai Pisau Bermata Dua dalam Legitimasi Kekuasaan 14
BAB VII — SINTESIS KOMPARATIF: SATU POLA DIALEKTIS, EMPAT ISI AKSIOLOGIS **15**
7.1 Tabel Pola: Akar Aksiologis dan Hasil Historiografis 15
7.2 Universalitas Mekanisme, Partikularitas Isi 15
7.3 Titik Temu dan Titik Tegang Antar-Peradaban 15
BAB VIII — PENUTUP **17**
DAFTAR PUSTAKA **18**

BAB I — PENDAHULUAN

Historiografi atas peristiwa historis tidak pernah lahir dari ruang kosong. Setiap kali suatu peradaban menyusun narasi tentang masa lalunya — memilih peristiwa mana yang layak diceritakan, siapa yang ditempatkan sebagai pahlawan dan siapa sebagai pengkhianat, momen mana yang dianggap "indah" untuk dikanonisasi dan momen mana yang layak dilupakan — ia melakukannya dengan bertumpu pada sesuatu yang lebih dalam dan lebih dahulu ada: sistem nilai aksiologis. Aksiologi, sebagai cabang filsafat yang menaungi etika (nilai tentang yang baik dan benar) dan estetika (nilai tentang yang indah dan pantas), bukan sekadar produk sampingan dari proses historiografis, melainkan *fundamental resource* — sumber daya dasar — yang memicu bagaimana rekayasa sosio-historis itu sendiri bekerja.

Tulisan ini mengajukan tesis bahwa relasi antara sistem nilai aksiologis dan rekayasa historiografi bersifat dialektis: aksiologi suatu peradaban membentuk kriteria tentang apa yang dianggap layak-historis (etis) dan layak-estetis (pantas dinarasikan secara indah/agung), sementara historiografi yang telah terbentuk melalui kriteria itu kemudian balik memperkuat, mereproduksi, dan bahkan merevisi sistem aksiologis yang melahirkannya. Tidak ada titik mula yang murni; aksiologi dan historiografi saling membentuk dalam lingkaran yang terus berputar sepanjang sejarah suatu peradaban.

Yang membedakan tulisan ini dari pembahasan tentang rekayasa historiografi pada umumnya adalah penekanannya pada keragaman *isi* aksiologis lintas peradaban. Jika etika dan estetika Barat bertumpu pada rasionalitas individual dan progres linear, etika dan estetika Cina klasik bertumpu pada harmoni relasional dan siklus kosmik; jika India menempatkan dharma dan transendensi rasa sebagai jangkar nilai, Islam menempatkan tauhid dan maqashid al-syari'ah sebagai porosnya. Keempat peradaban ini — Barat, Cina, India, dan Islam — akan ditelusuri secara komparatif untuk menunjukkan bahwa meski pola dialektis aksiologi-historiografi bersifat universal, isi dan arah rekayasa yang dihasilkannya sangat bergantung pada perspektif etis-estetis yang menjadi akar peradaban tersebut.

BAB II — KERANGKA TEORETIS: AKSIOLOGI SEBAGAI FUNDAMENTAL RESOURCE DALAM DIALEKTIKA HISTORIOGRAFIS

2.1 Aksiologi: Etika dan Estetika sebagai Dua Cabang Satu Akar

Aksiologi, dalam tradisi filsafat, merujuk pada teori nilai secara umum, yang konvensional terbagi menjadi dua cabang utama: etika (nilai tentang baik-buruk, benar-salah dalam tindakan dan karakter) dan estetika (nilai tentang indah-jelek, pantas-tidak pantas dalam bentuk dan pengalaman). Tulisan ini berangkat dari premis bahwa kedua cabang ini, meski sering dibahas terpisah dalam tradisi filsafat akademik, bekerja secara terjalin dalam praktik historiografis konkret: peristiwa yang dianggap "baik" untuk diingat (kriteria etis) hampir selalu juga dinarasikan dengan bentuk yang dianggap "indah" atau "agung" (kriteria estetis) — dan sebaliknya, peristiwa yang dinarasikan secara estetis memukau cenderung memperoleh bobot etis yang lebih besar dalam memori kolektif.

2.2 Dari Sign-Signifier ke Fundamental Resource: Pembalikan Arah Analisis

Jika dalam kerangka semiotik historiografis konvensional, peristiwa historis diposisikan sebagai *signified* yang melahirkan nilai sebagai *signifier* (peristiwa mendahului nilai), tulisan ini mengajukan pembalikan dan pelingkaran arah: aksiologi yang sudah dimiliki suatu peradaban *sebelum* peristiwa tertentu terjadi, ikut menentukan *bagaimana* peristiwa itu akan dibaca, diseleksi, dan dinarasikan sebagai signified yang signifikan. Dengan kata lain, aksiologi bukan hanya hasil akhir dari historiografi, melainkan juga prasyarat aprioris yang memungkinkan suatu peristiwa "terlihat" sebagai layak-historis sama sekali.

Inilah yang dimaksud tulisan ini dengan *fundamental resource*: aksiologi berfungsi sebagai sumber daya dasar — semacam "modal nilai" yang telah tersedia dalam suatu peradaban — yang dipakai dan dieksploitasi (baik secara sadar oleh elite kekuasaan maupun secara tidak sadar oleh kesadaran kolektif) untuk merekayasa historiografi peristiwa. Tanpa modal aksiologis ini, rekayasa historiografi tidak memiliki bahan baku untuk bekerja: ia tidak tahu kriteria apa yang harus dipakai untuk memilih peristiwa mana yang "pantas" menjadi mitos pendiri, kemenangan agung, atau tragedi yang harus diingat selamanya.

2.3 Dialektika: Historiografi sebagai Reproduksi dan Revisi Aksiologi

Namun relasi ini tidak berhenti satu arah. Sekali suatu peristiwa dinarasikan melalui kriteria aksiologis tertentu dan kemudian dilembagakan (melalui pendidikan, ritual, kanon sastra, atau hukum), narasi

tersebut balik memperkuat aksiologi yang melahirkannya — bahkan dapat merevisi atau menggeser nuansanya. Historiografi tentang Perang Troya, misalnya, tidak hanya *mencerminkan* nilai-nilai kepahlawanan Yunani kuno; ia turut *membentuk* dan mengkristalkan apa yang kemudian dipahami sebagai keutamaan heroik (arete) dalam peradaban Yunani-Helenistik selanjutnya. Relasi ini bersifat resiprokal-dialektis, bukan kausal linear satu arah — sebuah lingkaran umpan balik antara nilai yang sudah ada dan narasi yang dihasilkannya.

2.4 Kerangka Komparatif: Empat Peradaban, Empat Akar Aksiologis

Untuk menguji kerangka dialektis ini, tulisan ini menelusuri empat peradaban besar dengan akar aksiologis etika-estetika yang secara prinsipil berbeda: Barat (rasionalitas individual, progres linear), Cina (harmoni relasional, keseimbangan kosmik), India (dharma-karma, transendensi rasa), dan Islam (tauhid, maqashid al-syari'ah). Pembacaan komparatif ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pola dialektis aksiologi-historiografi bersifat universal sebagai mekanisme, namun isi dan arah rekayasa yang dihasilkannya senantiasa partikular — ditentukan oleh perspektif etis-estetis akar peradaban masing-masing.

BAB III — PERADABAN BARAT: RASIONALITAS INDIVIDUAL, PROGRES LINEAR, DAN HISTORIOGRAFI HEROIK

3.1 Akar Aksiologis: Etika Rasional-Individual dan Estetika Mimesis-Progresif

Tradisi Barat, sejak Yunani klasik hingga Pencerahan Eropa, membangun aksiologinya di atas dua pilar yang saling menopang. Secara etis, keutamaan (arete dalam tradisi Yunani, virtue dalam tradisi Latin-Kristen, kemudian autonomy dalam etika Kantian) dipahami sebagai kapasitas individu rasional untuk menentukan dan menjalankan yang baik melalui pertimbangan akal. Secara estetis, tradisi mimesis Aristotelian memandang seni dan narasi yang baik sebagai representasi yang menggugah katarsis melalui struktur naratif berarah (permulaan-tengah-akhir, dengan klimaks dan resolusi) — sebuah estetika yang inheren bersifat progresif-linear, bukan siklikal.

3.2 Bagaimana Aksiologi Memicu Historiografi: Narasi Heroik dan Teleologi Sejarah

Kombinasi etika rasional-individual dan estetika mimesis-progresif inilah yang menjadi fundamental resource bagi historiografi Barat sejak Herodotus dan Thukydides: sejarah dinarasikan sebagai rangkaian tindakan individu-individu besar (tokoh, jenderal, raja, filsuf) yang melalui kebijaksanaan atau kegagalan rasionalnya menentukan arah peristiwa — sebuah pola yang kemudian dikenal sebagai "Great Man Theory" dalam historiografi abad ke-19. Estetika progresif-linear yang sama juga melahirkan gagasan teleologi sejarah: dari narasi Kristen tentang sejarah keselamatan (dari Penciptaan menuju Penghakiman) hingga sekularisasinya dalam gagasan Pencerahan tentang Progress — sejarah dipahami sebagai garis yang bergerak maju menuju penyempurnaan, bukan lingkaran yang berulang.

3.3 Dialektika Balik: Historiografi Heroik Memperkuat Individualisme

Sebagaimana ditegaskan kerangka dialektis tulisan ini, relasi ini tidak berhenti satu arah. Historiografi heroik yang lahir dari etika rasional-individual kemudian balik memperkuat aksiologi tersebut: kanon sejarah Barat yang dipenuhi tokoh-tokoh besar individual (dari Alexander hingga Napoleon, dari Sokrates hingga Newton) menjadi materi pendidikan yang terus-menerus mereproduksi keyakinan bahwa individu rasional adalah unit fundamental perubahan historis — sebuah keyakinan yang pada gilirannya memperkuat institusi hukum dan politik Barat modern yang berpusat pada hak dan tanggung jawab individu (liberalisme, hak asasi manusia berbasis individu).

3.4 Rekayasa: Siapa yang Menentukan "Layak Historis" di Barat?

Penting dicatat bahwa kriteria etika-estetika rasional-individual ini sendiri bersifat selektif secara struktural: ia secara historis cenderung mengabaikan atau meminggirkan aktor kolektif, anonim, atau non-elite (budak, perempuan, rakyat biasa, peradaban non-Eropa) dari kanon historiografi "layak-historis", justru karena kriteria aksiologisnya sendiri menuntut keterlihatan individu rasional sebagai prasyarat kelayakan naratif. Kritik historiografi sosial dan pascakolonial abad ke-20 (Annales School, subaltern studies) pada dasarnya adalah upaya merevisi fundamental resource aksiologis ini sendiri — bukan sekadar menambah fakta baru, melainkan menggugat kriteria etis-estetis tentang apa yang dianggap layak dinarasikan sebagai sejarah.

BAB IV — PERADABAN CINA: HARMONI RELASIONAL, KESEIMBANGAN KOSMIK, DAN HISTORIOGRAFI MANDAT LANGIT

4.1 Akar Aksiologis: Etika Relasional-Harmoni dan Estetika Keseimbangan

Tradisi Cina klasik, terutama melalui Konfusianisme, membangun aksiologi yang secara fundamental berbeda dari rasionalitas individual Barat. Secara etis, kebaikan (ren, kebajikan kemanusiaan) dipahami bukan sebagai kapasitas individu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kualitas relasional yang hanya terwujud dalam jaringan hubungan sosial yang tertata (li, ritus/kepatutan) — ayah-anak, penguasa-rakyat, suami-istri, kakak-adik, sahabat-sahabat. Secara estetis, keindahan dipahami melalui prinsip keseimbangan dan harmoni kosmik (he), sebagaimana tercermin dalam estetika lukisan tinta, taman, dan puisi klasik Cina yang menjunjung kekosongan (xu) dan keselarasan dengan alam, bukan ekspresi individual yang menonjol.

4.2 Bagaimana Aksiologi Memicu Historiografi: Mandat Langit dan Siklus Dinasti

Etika relasional-harmoni ini menjadi fundamental resource bagi salah satu konsep historiografis paling berpengaruh dalam peradaban Cina: Mandat Langit (Tianming). Dalam kerangka ini, legitimasi suatu dinasti tidak ditentukan oleh kapasitas rasional individu penguasa semata, melainkan oleh keselarasannya dengan harmoni kosmik-moral. Ketika harmoni ini terganggu — melalui kezaliman, korupsi, atau bencana alam yang dibaca sebagai tanda ketidakselarasan kosmik — Mandat Langit dianggap berpindah, melegitimasi pergantian dinasti. Historiografi Cina klasik, sebagaimana tercermin dalam karya-karya seperti catatan dinasti resmi (zhengshi), secara konsisten dinarasikan melalui pola siklikal: kebangkitan, kejayaan harmonis, kemerosotan moral, kekacauan, dan kebangkitan dinasti baru — bukan garis progresif linear sebagaimana Barat, melainkan siklus yang berulang dengan pola moral yang konsisten.

4.3 Dialektika Balik: Historiografi Siklikal Memperkuat Etika Harmoni

Narasi siklikal Mandat Langit yang dilembagakan melalui catatan dinasti resmi kemudian balik memperkuat etika relasional-harmoni: setiap dinasti baru memiliki kepentingan kuat untuk menulis ulang sejarah dinasti pendahulunya sebagai narasi kemerosotan moral (kehilangan harmoni), sekaligus memposisikan dirinya sebagai pemulih harmoni — sebuah praktik historiografis yang dikenal sebagai penulisan sejarah oleh dinasti penerus tentang dinasti sebelumnya. Praktik ini bukan sekadar propaganda politik belaka, melainkan secara mendalam mereproduksi keyakinan aksiologis

bahwa legitimasi kekuasaan secara inheren terikat pada keselarasan moral-kosmik, bukan pada kapasitas individual penguasa semata.

4.4 Rekayasa: Estetika Keseimbangan sebagai Instrumen Legitimasi

Estetika keseimbangan dan harmoni juga menjadi instrumen rekayasa yang eksplisit: penguasa dan istana secara sengaja mensponsori seni, sastra, dan arsitektur yang menampilkan keselarasan kosmik (simetri istana, kalender ritual, musik istana yang diatur ketat) sebagai pernyataan visual-estetis bahwa Mandat Langit masih berada di tangan mereka. Ketika estetika resmi ini gagal meyakinkan — ketika rakyat mengalami bencana, kelaparan, atau ketidakadilan yang nyata bertentangan dengan narasi harmoni istana — keretakan antara estetika resmi dan pengalaman rakyat inilah yang kerap menjadi pemicu legitimasi pemberontakan dan pergantian dinasti.

BAB V — PERADABAN INDIA: DHARMA-KARMA, TRANSENDENSI RASA, DAN HISTORIOGRAFI KOSMOLOGIS-SIKLIKAL

5.1 Akar Aksiologis: Etika Dharma-Karma dan Estetika Rasa-Transendensi

Tradisi India klasik — Hindu, kemudian beririsan dengan Buddha dan Jaina — membangun aksiologi di atas konsep dharma (kewajiban moral-kosmik yang melekat pada posisi dan peran seseorang dalam tatanan semesta) dan karma (hukum kausalitas moral yang melampaui satu kehidupan). Berbeda dari etika rasional-individual Barat maupun etika relasional-sosial Cina, dharma bersifat kosmik-transenden: kebaikan diukur dari keselarasan tindakan dengan tatanan semesta (rta/dharma) yang jauh melampaui kehidupan dan masyarakat manusia semata. Secara estetis, tradisi India mengembangkan konsep rasa — pengalaman estetis yang dipahami sebagai jalan transendensi, di mana keindahan karya seni (tari, drama, puisi) berfungsi membawa penikmatnya melampaui ego individual menuju pengalaman kesadaran yang lebih luas, sebagaimana dirumuskan dalam tradisi Natyashastra.

5.2 Bagaimana Aksiologi Memicu Historiografi: Waktu Siklikal dan Itihasa sebagai Mitos-Sejarah

Etika dharma-karma dan estetika transendensi ini melahirkan konsepsi waktu historis yang sangat berbeda dari Barat maupun Cina: waktu kosmik dalam tradisi Hindu dipahami melalui siklus yuga (Satya, Treta, Dwapara, Kali) yang berulang dalam skala kosmik yang jauh melampaui rentang hidup peradaban manusia mana pun. Konsekuensinya, genre historiografi India klasik — itihasa (secara literal "demikianlah terjadi", mencakup karya seperti Mahabharata dan Ramayana) — tidak membedakan secara tegas antara peristiwa historis dan mitos kosmologis sebagaimana kategori modern. Peristiwa seperti Perang Kurukshetra dinarasikan bukan sebagai catatan faktual linear, melainkan sebagai manifestasi dharma kosmik yang sedang diuji dan ditegakkan — kemenangan dan kekalahan dibaca melalui kerangka keselarasan dharma, bukan kapasitas rasional individual atau harmoni sosial-relasional semata.

5.3 Dialektika Balik: Itihasa Memperkuat Dharma sebagai Kerangka Hidup

Itihasa yang dilembagakan melalui resitasi ritual, pertunjukan, dan pendidikan tradisional kemudian balik memperkuat aksiologi dharma-karma dalam kehidupan praktis: kisah Mahabharata dan Ramayana menjadi sumber rujukan etis sehari-hari bagi jutaan praktisi Hindu lintas generasi — sebuah dialektika di mana narasi "historis-mitologis" terus-menerus mereproduksi kerangka dharma

yang menjadi fundamental resource bagi penulisan narasi itu sejak awal. Tokoh seperti Yudhishthira atau Rama tidak sekadar diingat sebagai figur historis, melainkan terus dipanggil ulang sebagai paradigma etis yang hidup, mengukuhkan kembali kriteria dharma setiap kali dikutip dalam konteks moral kontemporer.

5.4 Rekayasa: Kasta, Legitimasi Dinasti, dan Reinterpretasi Dharma

Konsep dharma yang fleksibel dan kontekstual (svadharma — dharma yang berbeda sesuai posisi sosial) membuka ruang rekayasa yang signifikan: penguasa dan kasta Brahmana sepanjang sejarah India memiliki kapasitas untuk menafsirkan ulang apa yang dianggap dharma yang "benar" bagi kelompok sosial tertentu, termasuk melegitimasi struktur kasta dan kekuasaan dinasti tertentu sebagai bagian dari tatanan kosmik yang niscaya. Historiografi dinasti-dinasti India klasik (seperti prasasti-prasasti kerajaan yang mengklaim garis keturunan dari tokoh-tokoh epik) menunjukkan bagaimana fundamental resource aksiologis dharma-karma secara aktif dieksploitasi untuk legitimasi politik konkret, jauh melampaui fungsi spiritualnya semata.

BAB VI — PERADABAN ISLAM: TAUHID, MAQASHID AL-SYARI'AH, DAN HISTORIOGRAFI PROVIDENSIAL-UMAT

6.1 Akar Aksiologis: Etika Tauhid-Maqashid dan Estetika Keseimbangan Transenden

Peradaban Islam membangun aksiologinya di atas prinsip tauhid (keesaan Tuhan) sebagai fondasi metafisik yang menurunkan kerangka etis maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat: penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Berbeda dari dharma India yang kosmik-impersonal maupun harmoni relasional Cina yang berpusat pada tatanan sosial, etika Islam bersifat teosentris-personal: kebaikan diukur dari keselarasan dengan kehendak Tuhan yang transenden namun secara aktif terlibat dalam sejarah manusia. Secara estetis, tradisi Islam mengembangkan estetika keseimbangan transenden yang menghindari representasi figuratif berlebihan (sebagaimana tercermin dalam seni kaligrafi dan arabesque geometris) — keindahan dipahami sebagai jejak keteraturan ilahiah (mizan) yang tercermin dalam pola, bukan dalam penonjolan figur individual.

6.2 Bagaimana Aksiologi Memicu Historiografi: Sejarah sebagai Providensi Umat

Etika tauhid-maqashid ini melahirkan pola historiografi yang khas: sejarah Islam klasik (sebagaimana tercermin dalam karya seperti Tarikh al-Thabari) dinarasikan sebagai providensi — rangkaian peristiwa yang menampakkan kehendak dan rencana Tuhan bagi umat (komunitas Muslim sebagai kesatuan transnasional), bukan sekadar rangkaian tindakan individu rasional (Barat) atau siklus harmoni kosmik impersonal (Cina/India). Kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan, dibaca melalui kerangka apakah umat menjalankan atau menyimpang dari maqashid syariat — sebuah pola yang menjelaskan mengapa historiografi Islam klasik secara konsisten menyelipkan penilaian moral-teologis (apakah suatu khalifah adil/zalim, apakah suatu kebijakan sesuai maslahah) sebagai bagian integral dari narasi faktual, bukan terpisah darinya.

6.3 Dialektika Balik: Historiografi Providensial Memperkuat Maqashid sebagai Kerangka Politik

Historiografi providensial-umat ini, setelah dilembagakan melalui pendidikan pesantren/madrasah dan tradisi ulama, balik memperkuat maqashid al-syari'ah sebagai kerangka evaluasi politik yang hidup: setiap kali sejarah khalifah zalim dinarasikan dan dikontraskan dengan khalifah adil (pola yang konsisten sejak historiografi awal Islam), narasi ini mereproduksi kriteria maqashid sebagai standar legitimasi kekuasaan yang terus dirujuk ulang oleh generasi-generasi berikutnya — termasuk dalam

gerakan-gerakan reformis dan revivalis Islam modern yang mengutip historiografi klasik untuk melegitimasi proyek politik kontemporer mereka.

6.4 Rekayasa: Tauhid sebagai Pisau Bermata Dua dalam Legitimasi Kekuasaan

Prinsip tauhid yang secara teoretis meniadakan otoritas absolut manusia mana pun (karena hanya Tuhan yang berhak atas kedaulatan mutlak) justru membuka ruang rekayasa yang kompleks dalam praktik: penguasa-penguasa Muslim sepanjang sejarah berulang kali mengklaim legitimasi melalui penafsiran tertentu atas kehendak ilahiah atau maqashid syariat untuk kepentingan kekuasaan mereka sendiri — dari gelar "Khalifatullah" hingga klaim-klaim keagamaan oleh dinasti-dinasti yang historiografinya kemudian disusun untuk menegaskan keselarasan mereka dengan tauhid dan maqashid, terlepas dari realitas politik yang kerap jauh dari ideal tersebut.

BAB VII — SINTESIS KOMPARATIF: SATU POLA DIALEKTIS, EMPAT ISI AKSIOLOGIS

7.1 Tabel Pola: Akar Aksiologis dan Hasil Historiografis

Penelusuran atas empat peradaban menunjukkan satu pola struktural yang konsisten meski isi aksiologisnya sangat berbeda. Barat, dengan etika rasional-individual dan estetika mimesis-progresif, menghasilkan historiografi heroik-linear yang berpusat pada tokoh dan teleologi progres. Cina, dengan etika relasional-harmoni dan estetika keseimbangan kosmik, menghasilkan historiografi siklikal Mandat Langit yang berpusat pada keselarasan moral-kosmik dinasti. India, dengan etika dharma-karma dan estetika rasa-transendensi, menghasilkan historiografi kosmologis-siklikal yang melebur batas mitos dan sejarah dalam kerangka itihasa. Islam, dengan etika tauhid-maqashid dan estetika keseimbangan transenden, menghasilkan historiografi providensial-umat yang menilai peristiwa melalui kerangka keselarasan dengan kehendak ilahiah dan maslahah kolektif.

7.2 Universalitas Mekanisme, Partikularitas Isi

Yang dapat ditarik sebagai kesimpulan komparatif bukanlah bahwa keempat peradaban "pada dasarnya sama", melainkan bahwa mekanisme dialektis antara aksiologi dan historiografi bersifat universal sebagai struktur, sementara isi konkretnya senantiasa partikular. Setiap peradaban memiliki fundamental resource aksiologisnya sendiri — sebuah "modal nilai" awal yang tidak dapat direduksi menjadi modal nilai peradaban lain — yang kemudian dieksploitasi, direproduksi, dan kadang direvisi melalui proses historiografis yang panjang. Tidak ada peradaban yang menghasilkan historiografi dari ruang kosong aksiologis; sebaliknya, tidak ada aksiologi yang tetap statis tanpa terus-menerus diperkuat atau digugat oleh historiografi yang dihasilkannya.

7.3 Titik Temu dan Titik Tegang Antar-Peradaban

Penting dicatat bahwa dalam dunia kontemporer yang semakin terhubung, keempat sistem aksiologis-historiografis ini tidak lagi berkembang dalam isolasi, melainkan saling bersentuhan, berkontestasi, dan kadang berhibridisasi. Historiografi pascakolonial di banyak negara bekas jajahan, termasuk dalam konteks dunia Islam dan Asia, menunjukkan pergumulan antara fundamental resource aksiologis pribumi (relasional, providensial, dharma-karma) dengan fundamental resource aksiologis Barat yang dibawa melalui pendidikan kolonial (rasional-individual, progresif-linear) — sebuah pergumulan yang sendirinya menjadi medan rekayasa sosio-historis baru, di mana pertanyaan

"aksiologi siapa yang akan menjadi fundamental resource bagi historiografi nasional" menjadi pertaruhan politik yang sangat nyata.

BAB VIII — PENUTUP

Tulisan ini telah mengajukan dan menguji tesis bahwa sistem nilai aksiologis — etika dan estetika — berfungsi sebagai fundamental resource yang memicu rekayasa sosio-historis dalam historiografi peristiwa, melalui relasi yang bersifat dialektis-resiprokal dengan historiografi yang dihasilkannya, bukan relasi kausal satu arah. Penelusuran komparatif atas empat peradaban besar — Barat, Cina, India, dan Islam — menunjukkan bahwa pola dialektis ini bersifat universal sebagai mekanisme, namun isi dan arah konkretnya senantiasa ditentukan oleh perspektif etis-estetis partikular yang menjadi akar masing-masing peradaban: rasionalitas individual dan progres di Barat, harmoni relasional dan keseimbangan kosmik di Cina, dharma-karma dan transendensi rasa di India, serta tauhid dan maqashid al-syari'ah di Islam.

Implikasi dari tesis ini mengundang kewaspadaan epistemologis: setiap kali kita membaca atau menyusun historiografi atas suatu peristiwa, kita tidak pernah melakukannya dari posisi aksiologis netral. Fundamental resource etis-estetis yang kita warisi dari peradaban kita masing-masing senantiasa membentuk apa yang kita anggap layak diceritakan, indah untuk dikanonisasi, dan benar untuk diteladani — sementara historiografi yang kita hasilkan akan terus-menerus memperkuat atau menggugat fundamental resource tersebut bagi generasi setelah kita. Penelitian lanjutan dapat memperdalam tesis ini dengan menelusuri titik-titik kontak dan hibridisasi antar-sistem aksiologis dalam historiografi pascakolonial dan global kontemporer secara lebih mendalam.

Wallahu a'lam bishawab.

DAFTAR PUSTAKA

Annales school. (2026, June 22). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Annales_school

Aristotle. (2022). *How to tell a story: Aristotle's Poetics* (P. Freeman, Trans.). Princeton University Press.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (1999, March 23). *Fernand Braudel*. Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Fernand-Braudel

Chinaknowledge. (n.d.). *Tianming 天命, the Mandate of Heaven*. http://www.chinaknowledge.de/History/Terms/tianming.html

de Saussure, F. (1959). *Course in general linguistics* (W. Baskin, Trans.). Philosophical Library. (Karya asli diterbitkan 1916)

Guha, R. (1999). *Elementary aspects of peasant insurgency in colonial India*. Duke University Press.

Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic jurisprudence*. Ilmiah Publishers.

Pattanaik, D. (2026, January 23). *Brief history of rasa, India's aesthetic theory*. https://devdutt.com/brief-history-of-rasa-indias-aesthetic-theory/

Rasa (aesthetics). (2026, May 14). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Rasa_(aesthetics)

Maqasid. (2024, November 11). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Maqasid

Mandate of Heaven. (2026, June 5). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Mandate_of_Heaven

Mou, B., et al. (2026). The mandate of Heaven: One of the fundamental beliefs in Confucian China. *Religions, 17*(2), 150. https://doi.org/10.3390/rel17020150

Poetics (Aristotle). (2026, June 20). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Poetics_(Aristotle)

Ranajit Guha. (2026, April 30). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Ranajit_Guha

Shahid, S. (2019). Maqâsid al-syari'ah as a guide in establishing the law. *Proceedings of the 1st International Conference on Administration Science (ICAS 2019)*. https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.13-2-2019.2286047

Subaltern Studies. (2026, May 26). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Subaltern_Studies

World History Encyclopedia. (2017, July 25). *Mandate of Heaven*. https://www.worldhistory.org/Mandate_of_Heaven/